PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN DASAR BAGI KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

FIRDAUS

Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Jakarta Selatan
Email: firdaus_ham@yahoo.co.id

(Naskah diterima :28/10/2013, direvisi :26/11/2013, disetujui : 10/12/2013)

Abstract

The purpose of the study was intended to determine the policy of the local government in the fulfillment of the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary education in remote indigenous areas . The purpose of the study was intended to determine the policy of the local government in the fulfillment of the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary education in remote indigenous areas . The data used in this study is a secondary data collected by literature search (library research) and primary data (field research) that the data collected from each subject , in this case the informant Department of Education , Principals & teachers (formal) , organizers of non education informal (outside of school) , Community leader / religious , NGO , parents , and Children of primary school age (which is still in school and dropping out of school) . While the primary data collection tool was the interview will be made to suit the needs of the target group of the study. The study sample was taken from the whole group / unit Belu District Education Office in East Nusa Tenggara Province . Local Government Policy in the fulfillment of basic education rights to people in remote indigenous communities have been working to improve the quality and quantity of basic education primary school . At the local government level , there are efforts in basic education budget allocated in the budget although it has not reached 20 % as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 . Constraints faced in the provision of basic education in the region is limited infrastructure and educators both in quantity and quality . Agencies active in implementing basic education programs in addition to the education office is the Regional Office of Religious and Social Service programs through family expectations (PKH) .

Keywords : Fulfillment of Basic Education Rights, a remote indigenous community

Abstrak

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar, dan kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar di wilayah adat terpencil. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar, dan kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar di wilayah adat terpencil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (library research) dan data primer (*field research*) yang dikumpulkan dari setiap subjek data, dalam hal ini informan Dinas Pendidikan, Kepala sekolah & guru (formal), Penyelenggara pendidikan non-formal (luar sekolah), Tokoh adat/agama, LSM, Orang tua murid, dan Anak usia sekolah dasar (yang masih sekolah dan yang putus sekolah). Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah wawancara akan dilakukan terhadap kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel penelitian ini diambil dari keseluruhan kelompok/unit Dinas Pendidikan di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak pendidikan dasar untuk masyarakat komunitas adat terpencil sudah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan kuantitas sekolah dasar. Di tingkat pemerintah daerah, ada upaya mengalokasikan anggaran pendidikan dasar di dalam APBD meskipun belum mencapai 20% sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Kendala melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Agama dan Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH). yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas. Instansi yang aktif dalam melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH).

Kata kunci: Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar, komunitas adat terpencil

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki lebih dari 17.600 pulau yang terletak di antara dua samudera dan dua benua. Keadaan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelago state*) terbesar di dunia, dua pertiga wilayahnya merupakan wilayah laut dengan garis pantai 81.000 kilometer, luas wilayah perairan mencapai 5,9 juta kilometer persegi, serta wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 4 juta kilometer persegi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah darat berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea, dan Timor Leste sedangkan wilayah laut berbatasan dengan delapan negara yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, dan Australia.

Pemerintah Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam penanganan wilayah-wilayah yang secara geografis relatif masih sulit dijangkau. Dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa lokasi yang masih dihuni oleh warga negara Indonesia berupa komunitas adat terpencil dan terisolir dari warga masyarakat lain yang ada di sekitarnya.

Keberadaan komunitas adat terpencil (KAT), termasuk KAT terpencil selama ini cenderung dianggap sebagai bagian pelengkap dari masyarakat pada umumnya. Fungsinya cenderung dijadikan sebagai kawasan khusus yang diperuntukkan bagi keperluan wisata dan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya sosioantropologis. Keunikan dan keeksotisan adat istiadatnya hanya untuk tujuan ekonomis dengan melupakan pemenuhan hak-haknya sebagai komunitas yang harus dilindungi.

Sebagai sebuah komunitas, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga negara lainnya. Hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Keberadaan yang terisolasi bukanlah halangan untuk adanya persamaan hak dan kewajiban.

KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik (Panduan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Perbatasan Negara, Departemen Sosial, Jakarta, 2004, hlm. 4). Isu KAT saat ini merupakan masalah bilateral dan internasional yang menyangkut kepentingan dua negara atau lebih. Oleh sebab itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai lembaga dunia yang melindungi kepentingan negara-negara di dunia memberikan perhatian secara khusus terhadap isu perbatasan termasuk komunitas yang berada pada wilayah perbatasan.

Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT, *tahun 2004*) terdapat sekitar 267.550 Kepala Keluarga atau sekitar 1.192.164 jiwa warga KAT. Secara keseluruhan KAT dijumpai pada 2.811 lokasi pemukiman di 28 provinsi. Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan jumlah KK KAT 33.865 sebaran di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Permasalahan geografis dan topografis menyebabkan beberapa wilayah sulit dijangkau sehingga berdampak pada ketertinggalan dalam derap pembangunan nasional, khususnya di bidang sosial, ekonomi, teknologi, serta perkembangan ideologi yang cukup memprihatinkan. Di wilayah KAT ini ditengarai pula kurang tersedianya pelayanan umum dan sosial, sehingga komunitas bersangkutan tidak dapat mengakses pelayanan pendidikan dasar.

Selain itu, kondisi sarana dan prasana pendidikan

yang tidak memadai serta ketidaksediaan maupun kerusakan gedung-gedung sekolah, fasilitas dan kekurangan jumlah guru yang memiliki kualifikasi menyebabkan kualitas pendidikan rendah.

Menurut **Katarina Tomasevski**, bahwa hak asasi manusia adalah penjaga dari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh negara, termasuk di bidang pendidikan, yang dilakukan oleh pemerintah. Pengingkaran terhadap hak atas pendidikan, menjadi penyebab tereksklusikannya seseorang dari kesempatan kerja, marginalisasi ke sektor informal, yang dibarengi dengan eksklusi dari skema jaminan sosial. Mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan kesempatan mencari penghidupan yang layak, tidak mungkin dilakukan tanpa mengakui dan memenuhi hak atas pendidikan. Demikian pula banyak problem sosial, ekonomi, budaya dan politik yang tidak dapat dipecahkan, kecuali dengan menyelesaikan persoalan hak atas pendidikan ini, sebagai kunci untuk membuka pemenuhan hak-hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya lainnya; ter masukhaksipildanpolitik(<http://habibch.wordpress.com/2008/02/17/pendidikan-untuk-semua-hak-atas-pendidikan-sebagai-hak-asasi-manusia/>), diakses pukul 13:55 WIB, 18 Maret 2008).

Pendidikan bagi setiap manusia termasuk warga komunitas adat terpencil adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Untuk itu, pendidikan merupakan kebutuhan yang penting untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupannya, karena setiap manusia memerlukan pendidikan agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan usia, bakat, minat, dan kecerdasannya.

Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pelayanan dan

pemenuhan pendidikan termasuk masyarakat adat yang terpencil.

Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Disamping itu, selama kurun waktu lima tahun terakhir ini wawasan kebangsaan Indonesia tengah diuji dengan munculnya berbagai konflik horizontal dan gerakan separatisme yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Kejadian ini dipicu dengan mencuatnya isu-isu ketimpangan ekonomi sebagai akibat dari tidak meratanya pembangunan termasuk belum terpenuhinya hak atas pendidikan masyarakat termasuk masyarakat adat di perbatasan antar negara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada dua permasalahan pokok yang perlu mendapat perhatian penting dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi komunitas adat terpencil?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar bagi masyarakat adat terpencil?

Tujuan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka secara khusus tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi komunitas adat terpencil.
2. Kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar di wilayah adat terpencil.

Metode Penelitian

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian di atas maka dilakukan penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pemenuhan hak atas pendidikan dasar bagi komunitas adat terpencil di lokasi penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kesimpulan ditarik dengan merujuk pada tujuan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) dan data primer (*field research*) yang dikumpulkan dari setiap subjek data, dalam hal ini informan Dinas Pendidikan, Kepala sekolah & guru (formal), Penyelenggara pendidikan non-formal (luar sekolah), Tokoh adat/agama, LSM, Orang tua murid, dan Anak usia sekolah dasar (yang masih sekolah dan yang putus sekolah). Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah wawancara akan dilakukan terhadap kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel penelitian ini diambil dari keseluruhan kelompok/unit Dinas Pendidikan di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hak atas Pendidikan

Menurut **Manfred Nowak** Hak atas pendidikan merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM). Pendidikan merupakan suatu prasyarat bagi pelaksanaan HAM, karena penikmatan dari hak-hak sipil dan politik tergantung dari suatu tingkat minimum pendidikan, terutama melek huruf (*literacy*). Begitu pula, banyak hak ekonomi, sosial, dan budaya hanya dapat dilaksanakan secara berarti apabila orang telah mencapai suatu tingkat pendidikan minimum.

Sedangkan pandangan lain yang disampaikan oleh **Katarina Tomasevski** bahwa HAM terfokus pada hubungan vertikal, antara rakyat dan negara, melalui serangkaian keberhasilan dan larangan-larangan. Hal ini memperinci apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintahan, secara individu

maupun kolektif. Memastikan pendidikan gratis serta wajib mencakup seluruh anak pada usia sekolah dan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan (seperti menghadapkan anak-anak usia sekolah kepada indoktrinasi).

Marshall menegaskan hak atas pendidikan adalah hak sosial yang sejati bagi warga negara, sebab tujuan pendidikan adalah merancang masa depan orang dewasa *The right to education is a genuine social right of citizenship, because the aim of education during childhood is to shape the future adult*. Hak ini bukan hanya hak anak, tetapi juga merupakan orang dewasa (*as the right of the adult citizen to have been educated*). Marshall menyatakan tanpa pendidikan tidak mungkin masyarakat mencapai kebebasan dan karena itu pendidikan merupakan suatu prasyarat yang diperlukan bagi kebebasan sipil (*education is a necessary prerequisite of civil freedom*). Kebebasan warganegara diperoleh setelah mereka mendapat pendidikan dasar, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya.

Hak atas pendidikan sudah menjadi hak hukum (*legal rights*) karena sudah diatur dalam hukum positif. Dalam hal ini, Marshall menerangkan bahwa: *“Legal rights, are rights which are enshrined in the law and are therefore enforceable through the courts”*. Oleh karena itu, Marshall menyebut hak ini sebagai *positive rights*, di mana wajib ada ikhtiar dari negara untuk memenuhi dan melindungi hak ini bagi setiap warga negara. Sebagai hak positif pelaksanaannya dilakukan oleh negara. Setiap warga negara dapat menuntut negara atau pemerintah agar memenuhi dan melindungi hak atas pendidikan yang termasuk dalam kategori hak-hak sosial.

Sebagai suatu hak yang harus dipenuhi oleh Negara, maka sangatlah wajar apabila Negara mengeluarkan biaya yang banyak untuk pemenuhan (*to fulfil*), perlindungan (*to protect*), dan pemajuan (*to promote*) terhadap pendidikan (dasar). Hal ini didasarkan penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya menghabiskan biaya (*cost centre*), bukan yang dapat mendatangkan keuntungan (*profit centre*).

Sri Soemantri (1999:2) dalam Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 menjelaskan Sistem pendidikan nasional belum berhasil melakukan transformasi sosial melalui pendidikan yang baik dan merata sebagai modal sosial bagi eksistensi bangsa. Suatu bangsa akan gagal apabila tidak mempunyai sistem pendidikan yang baik, karena warga negara belum mengetahui dengan baik tujuan berbangsa dan bernegara. Padahal, pada tahun 1974 Sri Soemantri telah mengingatkan tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, karena warga negara harus mengetahui tujuan bernegara, hak-hak dan kewajibannya.

Namun demikian, kenyataan menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang besar antara *das Sollen* dan *das Sein* di mana banyak warga Negara khususnya masyarakat di daerah komunitas adat terpencil yang masih hidup dalam keterbelakangan pendidikan dan kemiskinan, Fakta ini menunjukkan masih kurang kesadaran dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat bahwa pendidikan dasar merupakan salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia.

Pengertian Komunitas Adat Terpencil

KAT sebagai bagian dari masyarakat Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan terbatas atau tidak adanya akses pelayanan sosial yang diperoleh sehingga mereka hidup dalam kondisi yang tertinggal dan terbelakang.

Ada tiga rujukan yang akan digunakan untuk melakukan pemahaman terhadap pengertian komunitas adat (umumnya dikenal sebagai *Traditional Communities*, karena masyarakat Indonesia baik modern maupun tradisional dapat disebut *Indigenous* atau berasal dari tanah air).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden No. 111 tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan

Sosial Komunitas Adat Terpencil, Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang selama ini dikenal dengan sebutan masyarakat terasing adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Karakteristik komunitas adat menurut Pasal 1 ayat (2) Keppres No. 111 tahun 1999 adalah berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen; pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan; pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau; pada umumnya hidup dengan ekonomi subsistem; peralatan dan teknologinya sederhana; ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Pemenuhan Hak atas Pendidikan bagi Komunitas Adat Terpencil

Pendidikan merupakan salah satu HAM yang melekat pada diri setiap warga Negara. Pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan dasar sebagai HAM ini merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, yang diamanatkan oleh UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan sosial. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Pasal 26 DUHAM menyatakan setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan. Bunyi Pasal 26 tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan negara, yaitu salah satunya

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 aline IV).

Tujuan penyelenggaraan negara tersebut dirumuskan dalam Pasal 31 UUD 1945 yang telah diamandemen yang diperjelas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan: (1). Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2). Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3). Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4). Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; dan (5). Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Secara historis memang tanggungjawab utama pemenuhan hak atas pendidikan anak berada di tangan orang tua anak masing-masing dan berikutnya tanggungjawab ini berada di tangan masyarakat. Dalam masyarakat yang sudah mempunyai pemerintahan yang demokratis, tanggungjawab utama pemenuhan hak atas pendidikan ini berada di tangan pemerintah yang menguasai sumber daya alam.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar Kondisi Geografis dan Demografis

Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak di belahan paling selatan wilayah Indonesia. Di bagian barat berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat, di sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar, di timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Negara Timor Leste serta di selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Propinsi ini terdiri atas 566 pulau, 246 pulau mempunyai nama dan 320 pulau lainnya belum mempunyai nama. Luas daratan di provinsi ini

47.349,9 Km dan luas lautan mencapai 200.000 Km. Dengan demikian, secara umum provinsi ini sebenarnya merupakan daerah kepulauan.

Secara administratif, wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah berkembang dari tahun ke tahun sesuai dengan dinamika kependudukan. Keadaan terakhir, Nusa Tenggara Timur terdiri atas 15 daerah tingkat II, yaitu: Kabupaten Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Kupang, Rote-Ndao, Sumba Timur dan Sumba Barat, serta satu kota yaitu Kota Kupang. Dari 15 wilayah administratif pemerintahan tingkat II ini menaungi 191 kecamatan dan 2.608 kelurahan/desa. Luas wilayah masing-masing kabupaten cukup bervariasi, dimana Kabupaten Sumba Timur memiliki luas wilayah terbesar yaitu 7.000,50 kilometer persegi, dan yang terkecil adalah Kota Kupang dengan luas wilayah hanya 160,34 kilometer persegi.

Kependudukan dan Pendidikan

Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 adalah sebanyak 4.218.795 jiwa yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Penduduk yang mendiami Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari bermacam-macam ras, seperti ras Negroid (campuran Negroid dan Astroafrikan) dan ras Eropoid (Mediteran). Diperkirakan di daerah ini hidup kurang lebih 17 suku dengan 32 bahasa. Rincian jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat dalam tabel 10 dibawah (Profil Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005).

Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Nusa Tenggara Timur periode 1990 – 2000 sebesar 1,6 persen per tahun. Keadaan ini sudah menurun jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni pada periode 1971 – 1980 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,95 persen per tahun, periode 1980 – 1990 sebesar 1,79 persen per tahun, periode 1990 – 1995 menjadi 1,82 persen per tahun, periode 1996 – 2000 menjadi 1,86 persen per tahun dan terakhir periode

2001 – 2005 menjadi 1,84 persen per tahun.

Berdasarkan data BPS Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2004 kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur menunjukkan sekitar 89,10 orang per kilometer persegi yang berarti telah mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk pada Tahun 2003 yaitu berkisar 86,58 orang per kilometer persegi. Bila ditinjau per kabupaten/kota maka pada tahun 2005 Kota Kupang menjadi daerah yang terpadat penduduknya dengan tingkat kepadatan yang mencapai kurang lebih 1.671,06 orang per kilometer persegi. Sedangkan kabupaten Sumba Timur menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang terendah dengan angka kepadatan 29,16 orang per kilometer persegi.

Struktur umur penduduk Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 menunjukkan rata-rata penduduknya masih didominasi oleh penduduk berusia muda yaitu kurang dari 15 tahun. Namun dari tahun ke tahun proporsi penduduk usia 15 – 64 tahun memperlihatkan kecenderungan yang dinamis (berubah-ubah secara turun-naik), yaitu dari 54,75 persen pada tahun 1980, menjadi 55,71 persen pada tahun 1990, menjadi 57,96 persen pada tahun 1995 dan sempat berkurang menjadi 55,91 persen pada tahun 2001 dan menurun kembali menjadi 54,82 persen pada tahun 2005 (Profil Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005).

Perlu juga dicatat disini, bahwa salah satu ciri khas dan kekayaan di Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah adanya keanekaragaman etnis. Ada lebih dari 20 *ethno-linguistic groups* yang tersebar di propinsi ini, namun sayangnya tidak memiliki tradisi kebersamaan yang kokoh. Hal ini menyebabkan adanya keterpisahan secara kultural. Keterpisahan ini juga dipengaruhi oleh adanya pembatas-pembatas wilayah secara topografi, seperti perbukitan dan pegunungan, serta kondisi kepulauan.

Pemenuhan Hak Pendidikan Dasar

Di NTT kelas yang rusak untuk tingkat SD mencapai lebih dari separuh dari total jumlah sekolah

yang ada, sedangkan untuk tingkat SMP mencapai kurang dari 20%. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Sub Dinas Pemberdayaan KAT bahwa kondisi sekolah di daerah KAT khususnya daerah perbatasan negara sangat memprihatinkan. Dana dekon sebesar 10 persen dari APBD belum cukup untuk menanggulangi dan mengatasi permasalahan KAT khususnya pemenuhan pendidikan bagi anak-anak di daerah KAT.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui pemberdayaan KAT masih berjalan walau dana yang diberikan oleh pusat tidak besar. Lokasi yang sudah diberdayakan, yaitu di Kabupaten Belu, Kecamatan Rinhat, Desa Tafuli, Suku Tafuli dengan jumlah 125 kepala keluarga. Sedangkan yang sedang diberdayakan adalah kecamatan Sasitamean, Desa Tunabesi, Suku Nefonafui dengan jumlah 177 kepala keluarga dan Desa Bani-Bani, Suku Eut Bani-Bani. Di Lokasi yang sudah dan sedang diberdayakan itu Dinas Sosial membangun perumahan bagi masyarakat KAT.

Selain jumlah gedung dan ruang kelas, fasilitas sekolah juga merupakan pendukung yang diperlukan bagi kelancaran proses belajar-mengajar. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kunjungan lapangan ke SD di daerah perbatasan Timor Leste (yaitu SDK Nanaeklot) fasilitas sekolah masih kurang memadai, khususnya dalam hal ketersediaan buku pelajaran, perpustakaan, WC, UKS, dan sarana/prasarana olah raga. Kekurangan (jumlah) guru diakui oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah. Untuk mengatasi masalah ini diakui dinas banyak mengangkat guru honor.

Salah satu penyebab dari kekurangan guru adalah karena adanya Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 yang menyatakan kewenangan dinas pendidikan tingkat provinsi adalah pada pendidikan khusus dan layanan khusus seperti sekolah. PP No. 25 tahun 2002 kemudian direvisi menjadi PP No. 41 tahun 2007 yang secara halus mengamputi kewenangan dinas pendidikan tingkat provinsi, seperti penentuan guru merupakan kewenangan pemerintah kota/kabupaten (Hasil Wawancara Dinas Pendidikan Prov. NTT).

Akan tetapi, dinas pendidikan provinsi terus berupaya mencapai program pendidikan dasar melalui

program perluasan akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah khususnya (wajib belajar). Program lainnya adalah melalui pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas dan lainnya. Yang lebih konkrit dalam mewujudkan pendidikan dasar (formal) adalah pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas dan pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) dan sebagainya. Mengenai dana pendidikan atau yang disebut dengan dana alokasi khusus yang dari pusat ada, tetapi tidak melalui provinsi sehingga sulit dipantau dan pemerintah daerah menyediakan alokasi sebesar 9 % dari APBD.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas. Instansi yang aktif dalam melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Agama provinsi dan dinas sosial melalui program keluarga harapan (PKH).

Dukungan masyarakat terhadap program pendidikan dasar berupa mendaftarkan anak usia sekolah ke sekolah formal yang ada di lingkungan terdekat.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar sudah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan kuantitas sekolah dasar. Di tingkat pemerintah daerah, ada upaya mengalokasikan anggaran pendidikan dasar di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah meskipun belum mencapai 20% sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Salah satu kendala penyelenggaraan pendidikan dasar adalah keterbatasan ruang kelas baik kualitas maupun kuantitas. Meskipun proses belajar mengajar dapat dilakukan di luar ruang

kelas, namun ruang kelas merupakan sarana yang sangat penting untuk kelancaran proses belajar mengajar. Selain fasilitas ruang kelas/gedung sekolah, fasilitas lain seperti lapangan olah raga, ruang UKS (unit kesehatan sekolah), perpustakaan, dan peralatan olah raga belum tersedia secara baik. Guru merupakan masalah serius yang dihadapi di seluruh wilayah yang dikunjungi. Kekurangan tenaga guru dialami oleh wilayah-wilayah yang sangat terpencil/terisolasi, baik karena keadaan geografis maupun karena kelangkaan sumber daya manusia. Selain jumlah, juga kualitas SDM guru yang mempunyai latar belakang pendidikan keguruan masih sangat terbatas.

Saran

1. Perlunya kerja sama pemerintah daerah dan lembaga-lembaga non pemerintah untuk menyediakan ruang kelas baik kuantitas maupun kualitas yang lebih baik guna mengatasi kekurangan ruang kelas (gedung sekolah) di daerah terpencil.
2. Pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga/organisasi non pemerintah setempat perlu mempertimbangkan membuka pusat pelatihan untuk menghasilkan tenaga pengajar lebih banyak (dengan memperhatikan tenaga lokal potensial untuk “membantu” guru (formal) yang tersedia).
3. Pemerintah daerah perlu mengupayakan secara terus menerus penyadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar bagi anak-anak melalui sosialisasi pemenuhan hak asasi setiap anak untuk menikmati pendidikan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian I angka 33 Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA) 1993. <http://www.ohchr.org/english/law/pdf/vienna.pdf>, diakses pukul 14:45, tanggal 18 Maret 2008.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Report on the Eighteenth and Nineteenth

Sessions: Official Records, New York and Geneva: Economic and Social Council of the United Nations, 1999.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Direktorat Pemberdayaan KAT - Dirjen Pemberdayaan Sosial, Panduan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Perbatasan Negara, Departemen Sosial, Jakarta, 2004.

Ifdhal Kasim, Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Hak atas Kesehatan : Catatan Elsam, diakses pukul 14:05, tanggal 2 Juli 2008, http://pushamuii.org/upl/article/id_kasus-ecosob.pdf.

M. Habib Chirzin, Pendidikan untuk Semua: Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia, <http://habibch.wordpress.com/2008/02/17/pendidikan-untuk-semua-hak-atas-pendidikan-sebagai-hak-asasi-manusia/>, diakses pukul 13:55 WIB, 18 Maret 2008.

Manfred Nowak, "The Right to Education", dalam Asbjorn Eide, Catarina Cruise, and Allan Rosas, Economic, Social and Cultural Rights, dikutip oleh M. Nur Rasyid dalam Mempertahankan Disertasinya, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Sebagai Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Panduan Operasional Bank Dunia OP. 4.10, September 1991 tentang Masyarakat Adat.

Profil Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005.

Katarina Tomasevski, Education Denied, (Alih Bahasa: Janet Dyah Ekawati), Pendidikan yang Terabaikan: Masalah dan Penyelesaiannya, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law bekerja sama dengan

Departemen Hukum dan HAM RI, 2003.

Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak.

Kompas, Pemerintah Harus Bertanggungjawab atas Pendidikan Dasar yang Berkualitas, 15 Desember 2004.

Sri Soemantri, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, PT Citra Aditya Bakti, 1999, Bandung.

<http://kepriprov.go.id/>

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.